



Sistem Birokrasi Pemkot Dirombak

YOGYA (KR) - Kota Yogyakarta menjadi *pilot project* program reformasi birokrasi yang digulirkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) di DIY. Diharapkan mulai 2013 mendatang, sistem birokrasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dapat lebih terbuka dalam hal pelayanan masyarakat.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengungkapkan, salah satu perombakan sistem tersebut ialah penilaian secara mandiri di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penilaian tersebut juga akan dilakukan secara online sehingga bisa diamati se-

cara vertikal (atasan) maupun horizontal (antar SKPD). "Dengan begitu, nanti kita semua bisa melihat bagaimana capaian kinerja masing-masing SKPD itu," ungkapnya di sela evaluasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Forkom-

panda) di Balaikota Yogyakarta, Rabu (28/11).

Salah satu capaian kinerja yang akan diamati, imbuh Haryadi, ialah serapan anggaran di tiap instansi. Hal ini lantaran hingga akhir tahun, serapan anggaran tersebut masih sangat rendah. Dari total anggaran belanja APBD 2012 sebanyak Rp 934,3 miliar, baru terserap Rp 663 miliar atau 70,96 persen. Bagi instansi yang serapannya rendah, maka akan mendapat peringatan.

Selain itu, beberapa proses seperti rekrutmen pegawai,

pengisian jabatan hingga distribusi pegawai akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini sejalan dengan perombakan sistem manajemen sumber daya pemerintahan di bawah pendampingan dari Kemenpan dan RB. "Semuanya nanti berbasis online sehingga pusat juga bisa mengawasi. Penilaian secara akumulatif akan dilakukan secara periodik setiap 6 bulan. Hasilnya, akan kami paparkan kepada publik," imbuh Haryadi sembari menunjuk Inspektorat dan Bagian Organisasi Kota Yogyakarta sebagai

pelaksana kegiatan.

Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Program Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah, dr Nadimah MBA mengatakan, di tingkat nasional perombakan sistem birokrasi sudah dilakukan sejak 2008 lalu. Sedangkan di tingkat daerah baru dimulai tahun 2012. Agar perombakan sistem birokrasi tersebut dapat berjalan maksimal, maka dibutuhkan komitmen kuat dari kepala daerah. "Tanpa ada komitmen, mustahil birokrasi bisa direformasi," tandasnya. (M-6)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 23 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005